

BUKU PANDUAN & SURAT PENAWARAN

PROGRAM PENDIDIKAN

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas | PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM PENDIDIKAN
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
2021

SURAT PENAWARAN



Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas | PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 1552/P.01/09/2020 17 September 2020
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Seleksi Program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021**

Yth.:
1. **Kepala Biro SDM/Organisasi dan Kepegawaian Kementerian/Lembaga;**
2. **Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;**
3. **Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.**
   (Daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di Kementerian/Lembaga, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2021. Program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2021 yang ditawarkan meliputi program **pendidikan gelar S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*** yang akan dilaksanakan di program studi yang telah kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas sesuai dengan kuota sebagaimana terlampir.

Program beasiswa S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan membangun *smart city* yang dikembangkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Program S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan Masterplan *Smart City* agar dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Sebagai informasi tambahan, program S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* dirancang dengan durasi studi maksimum 24 bulan dengan memasukan kegiatan magang pada institusi yang menyelenggarakan program *smart city*.

Calon peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* **diharuskan mendaftar melalui "Registrasi *online*"** di situs Pusbindiklatren Bappenas. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (*email*) tidak kami proses lebih lanjut**.

Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan *test of english as a foreign language* (TOEFL). Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan Gelar Tahun 2021), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 (cap pos).**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Dapat kami sampaikan pula bahwa sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan meminimalisir proses kegiatan seleksi TPA maupun TOEFL secara langsung, dalam proses seleksi program beasiswa ini kami dapat menerima nilai seleksi individual (TPA dan TOEFL) yang masih berlaku per Agustus 2021. Bagi peserta yang belum memiliki nilai individual baik TPA maupun TOEFL akan diwajibkan untuk mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	PROGRAM	WAKTU
1	Seleksi Nasional TPA S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020*
2	Seleksi Nasional ITP TOEFL S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020*
3	Pemanggilan Peserta S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* Tahun 2021 Tahap 1	Desember 2020*

*Keterangan : Jika ada perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Pusbindiklatren Bappenas juga berencana mengadakan pelatihan bahasa Inggris atau *Basic English for Academic Purposes* (BEAP) tahun 2020 selama dua minggu secara daring yang akan dilaksanakan bersama empat pusat bahasa dan/atau penyelenggara pelatihan bahasa Inggris seluruh Indonesia. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan BEAP, akan diinformasikan melalui surat penawaran terpisah.

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar
Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
Telepon: 021 31928280, 31928285
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs: htttp://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Guspika D.

Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;

Lampiran Surat Nomor : 1552/P.01/09/2020
Tanggal : 17 September 2020

Yth.:

I. **BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
6. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
18. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
20. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
21. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
22. Badan Pusat Statistik (BPS)
23. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
24. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
25. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
26. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
27. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
28. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
29. Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
31. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
32. Kejaksaan Agung
33. Kementerian Agama

34. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
35. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
36. Kementerian Dalam Negeri
37. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
38. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
39. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
40. Kementerian Kelautan dan Perikanan
41. Kementerian Kesehatan
42. Kementerian Ketenagakerjaan
43. Kementerian Komunikasi dan Informatika
44. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
45. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
46. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
47. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
48. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
49. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50. Kementerian Luar Negeri
51. Kementerian Pariwisata
52. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
53. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
54. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
55. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
56. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
57. Kementerian Perdagangan
58. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
59. Kementerian Perhubungan
60. Kementerian Perindustrian
61. Kementerian Pertahanan
62. Kementerian Pertanian
63. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
64. Kementerian Sekretariat Kabinet
65. Kementerian Sekretariat Negara
66. Kementerian Sosial
67. Kepolisian Republik Indonesia
68. Komisi Yudisial
69. Mahkamah Konstitusi
70. Ombudsman Republik Indonesia
71. Perpustakaan Nasional
72. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
73. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)

74. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
75. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

1.1. Kabupaten Aceh Barat
1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
1.3. Kabupaten Aceh Besar
1.4. Kabupaten Aceh Jaya
1.5. Kabupaten Aceh Selatan
1.6. Kabupaten Aceh Singkil
1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
1.8. Kabupaten Aceh Tengah
1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
1.10. Kabupaten Aceh Timur
1.11. Kabupaten Aceh Utara
1.12. Kabupaten Bener Meriah
1.13. Kabupaten Bireuen
1.14. Kabupaten Gayo Lues
1.15. Kabupaten Nagan Raya
1.16. Kabupaten Pidie
1.17. Kabupaten Pidie Jaya
1.18. Kabupaten Simeule
1.19. Kota Banda Aceh
1.20. Kota Langsa
1.21. Kota Lhokseumawe
1.22. Kota Sabang
1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

2.1. Kabupaten Asahan
2.2. Kabupaten Batubara
2.3. Kabupaten Dairi
2.4. Kabupaten Deli Serdang
2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
2.6. Kabupaten Karo
2.7. Kabupaten Labuhanbatu
2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.10. Kabupaten Langkat
2.11. Kabupaten Mandailing Natal
2.12. Kabupaten Nias
2.13. Kabupaten Nias Barat
2.14. Kabupaten Nias Selatan
2.15. Kabupaten Nias Utara
2.16. Kabupaten Padang Lawas
2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
2.18. Kabupaten Pakpak Bharat

2.19. Kabupaten Samosir
2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
2.21. Kabupaten Simalungun
2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
2.25. Kabupaten Toba Samosir
2.26. Kota Binjai
2.27. Kota Gunungsitoli
2.28. Kota Medan
2.29. Kota Padangsidempuan
2.30. Kota Pematangsiantar
2.31. Kota Sibolga
2.32. Kota Tanjugbalai
2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

3.1. Kabupaten Agam
3.2. Kabupaten Dharmasraya
3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
3.5. Kabupaten Padang Pariaman
3.6. Kabupaten Pasaman
3.7. Kabupaten Pasaman Barat
3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
3.9. Kabupaten Sijunjung
3.10. Kabupaten Solok
3.11. Kabupaten Solok Selatan
3.12. Kabupaten Tanah Datar
3.13. Kota Bukittinggi
3.14. Kota Padang
3.15. Kota Padangpanjang
3.16. Kota Pariaman
3.17. Kota Payakumbuh
3.18. Kota Sawahlunto
3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

4.1. Kabupaten Bengkalis
4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
4.4. Kabupaten Kampar
4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
4.7. Kabupaten Pelalawan
4.8. Kabupaten Rokan Hilir
4.9. Kabupaten Rokan Hulu
4.10. Kabupaten Siak

4.11. Kota Dumai
4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

5.1. Kabupaten Bintan
5.2. Kabupaten Karimun
5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
5.4. Kabupaten Lingga
5.5. Kabupaten Natuna
5.6. Kota Batam
5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

6.1. Kabupaten Batanghari
6.2. Kabupaten Bungo
6.3. Kabupaten Kerinci
6.4. Kabupaten Merangin
6.5. Kabupaten Muaro Jambi
6.6. Kabupaten Sarolangun
6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6.9. Kabupaten Tebo
6.10. Kota Jambi
6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

8.1. Kabupaten Banyuasin
8.2. Kabupaten Empat Lawang
8.3. Kabupaten Lahat
8.4. Kabupaten Muara Enim
8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
8.6. Kabupaten Musi Rawas
8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
8.8. Kabupaten Ogan Ilir
8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8.14. Kota Lubuklinggau
8.15. Kota Pagar Alam
8.16. Kota Palembang
8.17. Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9.1. Kabupaten Bangka
9.2. Kabupaten Bangka Barat
9.3. Kabupaten Bangka Selatan
9.4. Kabupaten Bangka Tengah
9.5. Kabupaten Belitung
9.6. Kabupaten Belitung Timur
9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

10.1. Kabupaten Lampung Tengah
10.2. Kabupaten Lampung Utara
10.3. Kabupaten Lampung Selatan
10.4. Kabupaten Lampung Barat
10.5. Kabupaten Lampung Timur
10.6. Kabupaten Mesuji
10.7. Kabupaten Pesawaran
10.8. Kabupaten Pesisir Barat
10.9. Kabupaten Pringsewu
10.10. Kabupaten Tulang Bawang
10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
10.12. Kabupaten Tanggamus
10.13. Kabupaten Way Kanan
10.14. Kota Bandar Lampung
10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

11.1. Kabupaten Lebak
11.2. Kabupaten Pandeglang
11.3. Kabupaten Serang
11.4. Kabupaten Tangerang
11.5. Kota Cilegon
11.6. Kota Serang
11.7. Kota Tangerang
11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

12.1. Kabupaten Bandung
12.2. Kabupaten Bandung Barat
12.3. Kabupaten Bekasi
12.4. Kabupaten Bogor
12.5. Kabupaten Ciamis

12.6. Kabupaten Cianjur
12.7. Kabupaten Cirebon
12.8. Kabupaten Garut
12.9. Kabupaten Indramayu
12.10. Kabupaten Kerawang
12.11. Kabupaten Kuningan
12.12. Kabupaten Majalengka
12.13. Kabupaten Pangandaran
12.14. Kabupaten Purwakarta
12.15. Kabupaten Subang
12.16. Kabupaten Sukabumi
12.17. Kabupaten Sumedang
12.18. Kabupaten Tasikmalaya
12.19. Kota Bandung
12.20. Kota Banjar
12.21. Kota Bekasi
12.22. Kota Bogor
12.23. Kota Cimahi
12.24. Kota Cirebon
12.25. Kota Depok
12.26. Kota Sukabumi
12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

14.1. Kabupaten Banjarnegara
14.2. Kabupaten Banyumas
14.3. Kabupaten Batang
14.4. Kabupaten Blora
14.5. Kabupaten Boyolali
14.6. Kabupaten Brebes
14.7. Kabupaten Cilacap
14.8. Kabupaten Demak
14.9. Kabupaten Grobokan
14.10. Kabupaten Jepara
14.11. Kabupaten Karanganyar
14.12. Kabupaten Kebumen
14.13. Kabupaten Kendal
14.14. Kabupaten Klaten
14.15. Kabupaten Kudus
14.16. Kabupaten Magelang

14.17. Kabupaten Pati
14.18. Kabupaten Pekalongan
14.19. Kabupaten Pemalang
14.20. Kabupaten Purbalingga
14.21. Kabupaten Purworejo
14.22. Kabupaten Rembang
14.23. Kabupaten Semarang
14.24. Kabupaten Sragen
14.25. Kabupaten Sukoharjo
14.26. Kabupaten Tegal
14.27. Kabupaten Temanggung
14.28. Kabupaten Wonogiri
14.29. Kabupaten Wonosobo
14.30. Kota Magelang
14.31. Kota Pekalongan
14.32. Kota Salatiga
14.33. Kota Semarang
14.34. Kota Surakarta
14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

15.1. Kabupaten Bangkalan
15.2. Kabupaten Banyuwangi
15.3. Kabupaten Blitar
15.4. Kabupaten Bojonegoro
15.5. Kabupaten Bondowoso
15.6. Kabupaten Gresik
15.7. Kabupaten Jember
15.8. Kabupaten Jombang
15.9. Kabupaten Kediri
15.10. Kabupaten Lamongan
15.11. Kabupaten Lumajang
15.12. Kabupaten Madiun
15.13. Kabupaten Magetan
15.14. Kabupaten Malang
15.15. Kabupaten Mojokerto
15.16. Kabupaten Nganjuk
15.17. Kabupaten Ngawi
15.18. Kabupaten Pacitan
15.19. Kabupaten Pamekasan
15.20. Kabupaten Pasuruan
15.21. Kabupaten Ponorogo
15.22. Kabupaten Probolinggo
15.23. Kabupaten Sampang
15.24. Kabupaten Sidoarjo
15.25. Kabupaten Situbondo
15.26. Kabupaten Sumenep
15.27. Kabupaten Trenggalek

15.28. Kabupaten Tuban
15.29. Kabupaten Tulungagung
15.30. Kota Batu
15.31. Kota Blitar
15.32. Kota Kediri
15.33. Kota Madiun
15.34. Kota Malang
15.35. Kota Mojokerto
15.36. Kota Pasuruan
15.37. Kota Probolinggo
15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

16.1. Kabupaten Bantul
16.2. Kabupaten Gunung Kidul
16.3. Kabupaten Kulon Progo
16.4. Kabupaten Sleman
16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

17.1. Kabupaten Badung
17.2. Kabupaten Bangli
17.3. Kabupaten Buleleng
17.4. Kabupaten Gianyar
17.5. Kabupaten Jembrana
17.6. Kabupaten Karangasem
17.7. Kabupaten Klungkung
17.8. Kabupaten Tabanan
17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

18.1. Kabupaten Bima
18.2. Kabupaten Dompu
18.3. Kabupaten Lombok Barat
18.4. Kabupaten Lombok Tengah
18.5. Kabupaten Lombok Timur
18.6. Kabupaten Lombok Utara
18.7. Kabupaten Sumbawa
18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
18.9. Kota Bima
18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

19.1. Kabupaten Alor
19.2. Kabupaten Belu
19.3. Kabupaten Ende
19.4. Kabupaten Flores Timur
19.5. Kabupaten Kupang
19.6. Kabupaten Lembata

19.7. Kabupaten Malaka
19.8. Kabupaten Manggarai
19.9. Kabupaten Manggarai Barat
19.10. Kabupaten Manggarai Timur
19.11. Kabupaten Ngada
19.12. Kabupaten Nagekeo
19.13. Kabupaten Rote Ndao
19.14. Kabupaten Sabu Raijua
19.15. Kabupaten Sikka
19.16. Kabupaten Sumba Barat
19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
19.18. Kabupaten Sumba Tengah
19.19. Kabupaten Sumba Timur
19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

20.1. Kabupaten Bengkayang
20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
20.3. Kabupaten Kayong Utara
20.4. Kabupaten Ketapang
20.5. Kabupaten Kubu Raya
20.6. Kabupaten Landak
20.7. Kabupaten Melawi
20.8. Kabupaten Pontianak
20.9. Kabupaten Sambas
20.10. Kabupaten Sanggau
20.11. Kabupaten Sekadau
20.12. Kabupaten Sintang
20.13. Kota Pontianak
20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

21.1. Kabupaten Balangan
21.2. Kabupaten Banjar
21.3. Kabupaten Barito Kuala
21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
21.7. Kabupaten Kotabaru
21.8. Kabupaten Tabalong
21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
21.10. Kabupaten Tanah Laut
21.11. Kabupaten Tapin
21.12. Kota Banjarbaru
21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

22.1. Kabupaten Barito Selatan
22.2. Kabupaten Barito Timur
22.3. Kabupaten Barito Utara
22.4. Kabupaten Gunung Mas
22.5. Kabupaten Kapuas
22.6. Kabupaten Katingan
22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
22.9. Kabupaten Lamandau
22.10. Kabupaten Murung Raya
22.11. Kabupaten Pulang Pisau
22.12. Kabupaten Sukamara
22.13. Kabupaten Seruyan
22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

23.1. Kabupaten Berau
23.2. Kabupaten Kutai Barat
23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
23.4. Kabupaten Kutai Timur
23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
23.6. Kabupaten Paser
23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
23.8. Kota Balikpapan
23.9. Kota Bontang
23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

24.1. Kabupaten Bulungan
24.2. Kabupaten Malinau
24.3. Kabupaten Nunukan
24.4. Kabupaten Tana Ttidung
24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

25.1. Kabupaten Boalemo
25.2. Kabupaten Bone Bolango
25.3. Kabupaten Gorontalo
25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
25.5. Kabupaten Pohuwato
25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

26.1. Kabupaten Bantaeng
26.2. Kabupaten Barru
26.3. Kabupaten Bone
26.4. Kabupaten Bulukumba
26.5. Kabupaten Enrekang
26.6. Kabupaten Gowa

26.7. Kabupaten Jeneponto
26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
26.9. Kabupaten Luwu
26.10. Kabupaten Luwu Timur
26.11. Kabupaten Luwu Utara
26.12. Kabupaten Maros
26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
26.14. Kabupaten Pinrang
26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
26.16. Kabupaten Sinjai
26.17. Kabupaten Soppeng
26.18. Kabupaten Takalar
26.19. Kabupaten Tana Toraja
26.20. Kabupaten Toraja Utara
26.21. Kabupaten Wajo
26.22. Kota Makassar
26.23. Kota Palopo
26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

27.1. Kabupaten Bombana
27.2. Kabupaten Buton
27.3. Kabupaten Buton Selatan
27.4. Kabupaten Buton Tengah
27.5. Kabupaten Buton Utara
27.6. Kabupaten Kolaka
27.7. Kabupaten Kolaka Timur
27.8. Kabupaten Kolaka Utara
27.9. Kabupaten Konawe
27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
27.11. Kabupaten Konawe Selatan
27.12. Kabupaten Konawe Utara
27.13. Kabupaten Muna
27.14. Kabupaten Muna Barat
27.15. Kabupaten Wakatobi
27.16. Kota Baubau
27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

28.1. Kabupaten Banggai
28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
28.3. Kabupaten Banggai Laut
28.4. Kabupaten Buol
28.5. Kabupaten Donggala
28.6. Kabupaten Morowali
28.7. Kabupaten Morowali Utara
28.8. Kabupaten Parigi Mountong
28.9. Kabupaten Poso

28.10. Kabupaten Sigi
28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
28.12. Kabupaten Toli-Toli
28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
29.8. Kabupaten Minahasa
29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
29.11. Kabupaten Minahasa Utara
29.12. Kota Bitung
29.13. Kota Kotamobagu
29.14. Kota Manado
29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

30.1. Kabupaten Majene
30.2. Kabupaten Minahasa
30.3. Kabupaten Mamuju
30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
30.5. Kabupaten Mamuju Utara
30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

31.1. Kabupaten Baru
31.2. Kabupaten Baru Selatan
31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
31.5. Kabupaten Maluku Tengah
31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
31.10. Kota Ambon
31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

32.1. Kabupaten Halmahera Barat
32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
32.3. Kabupaten Halmahera Timur
32.4. Kabupaten Halmahera Utara
32.5. Kabupaten Kepulauan Sula

32.6. Kabupaten Pulau Morotai
32.7. Kabupaten Taliabu
32.8. Kota Ternate
32.9. Kota Tidore Kepualauan

33. Provinsi Papua

33.1. Kabupaten Asmat
33.2. Kabupaten Biak Nunfor
33.3. Kabupaten Boven Digoel
33.4. Kabupaten Deiyai
33.5. Kabupaten Dogiyai
33.6. Kabupaten Intan Jaya
33.7. Kabupaten Jayapura
33.8. Kabupaten Jayawijaya
33.9. Kabupaten Keerom
33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
33.11. Kabupaten Lanny Jaya
33.12. Kabupaten Memberamo Raya
33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
33.14. Kabupaten Mappi
33.15. Kabupaten Merauke
33.16. Kabupaten Mimika
33.17. Kabupaten Nabire
33.18. Kabupaten Nduga
33.19. Kabupaten Paniai
33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
33.21. Kabupaten Puncak
33.22. Kabupaten Puncak Jaya
33.23. Kabupaten Sarmi
33.24. Kabupaten Supiori
33.25. Kabupaten Toikara
33.26. Kabupaten Waropen
33.27. Kabupaten Yahukimo
33.28. Kabupaten Yulimo
33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

34.1. Kabupaten Fakfak
34.2. Kabupaten Kaimana
34.3. Kabupaten Manokwari
34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
34.5. Kabupaten Maybrat
34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
34.7. Kabupaten Raja Ampat
34.8. Kabupaten Sorong
34.9. Kabupaten Sorong Selatan
34.10. Kabupaten Tambrauw
34.11. Kabupaten Teluk Bintuni

34.12. Kabupaten Teluk Wondama
34.13. Kota Sorong

PROGRAM PENDIDIKAN
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
2021

BUKU PANDUAN



Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas | PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu salah satu peran Kementerian PPN/Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) yang berkualitas tersebut maka salah satu sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas adalah tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aparatur pemerintah yang bekerja di badan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyiapkan, merumuskan, dan menyusun, serta melakukan pemantauan rencana pembangunan baik di instansi pusat dan daerah. Peningkatan kualitas AS perencana diarahkan tidak saja hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian perencana, tapi juga diarahkan pada perilaku perencana yang profesional.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas dan Fungsi dalam melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi perencana di pusat dan daerah. Peningkatan kompetensi ASN perencana dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik gelar maupun non-gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara di berbagai bidang perencanaan pembangunan. Program Pendidikan Gelar terdiri dari program S2 di dalam negeri dan luar negeri, program S2 *Linkage* (1 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri), serta S3 baik di dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2020, Pusbindiklatren berhasil menempatkan sekitar 322 karyasiswa yang terdiri dari 17 karyasiswa program *Linkage* Jepang, 20 karyasiswa program *Linkage* Premium, 43 karyasiswa program S2 Afirmasi Dalam Negeri, 18 karyasiswa program S2 Tematik Dalam Negeri, 221 karyasiswa program S2 Dalam Negeri dan 3 karyasiswa program S3 Dalam Negeri.

Sejalan dengan fungsinya sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2021. Program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2021 yang ditawarkan untuk meliputi program **pendidikan gelar S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*** yang akan dilaksanakan di program studi yang telah kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas sesuai dengan kuota sebagaimana terlampir.

1.2. Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa Pusbindiklatren Bappenas adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

PROGRAM BEASISWA

2.1. Informasi Program Beasiswa Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*, kami menawarkan program beasiswa untuk program S2 Dalam Negeri di 25 (dua puluh lima) program studi pada 11 (sebelas) universitas dalam negeri, yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren untuk jangka waktu perkuliahan selama 18 bulan.

Sementara untuk program S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* akan dilaksanakan di 3 (tiga) program studi pada 3 (tiga) universitas dalam negeri, yang kerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas untuk jangka waktu perkuliahan selama 24 bulan.

2.2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2021 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

NO	PERSYARATAN	S2 DN/S2 DN Tematik
1	**SYARAT ADMINISTRATIF**	
	Pengusulan Dari Instansi	Eselon II Kepegawaian
	Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan
	PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun
	Strata Pendidikan Minimal*	D4/S1*
	Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 Tahun
	Umur Maksimal**	37 Tahun**
	IPK Minimal	2.75
	Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II Kepegawaian
2	**SELEKSI NASIONAL**	
	Tes Potensi Akademik	
	Pusat	565
	Pusat Luar Jawa	525
	Pemda Jawa	525
	Pemda Luar Jawa	500
	TOEFL Minimal***	450***
	IBT TOEFL setelah EAP	
	Wawancara Tertulis	Menunjukan Komitmen

Keterangan :

*Hanya pada beberapa program studi menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.

** Batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun per 1 Agustus 2021

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program studi memiliki perbedaan persyaratan tersendiri diluar dari persyaratan Pusbindiklatren Bappenas, dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Institut Teknologi Bandung, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 475;

b. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Universitas Indonesia, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 500.

Bagi peserta dengan latar belakang pendidikan D4, berikut kami sampaikan ketentuan di masing-masing program studi:

a. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4

- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
- Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

b. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4 dengan syarat

- Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan dari STTD, STIP dan STPI;
- Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan syarat lulusan dari STAN dan STIS;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro dengan syarat mengikuti perkuliahan tambahan dengan biaya sendiri;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan syarat mengikuti perkuliahan tambahan dengan biaya sendiri
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada dengan syarat linear dengan MPWK serta pernah mengikuti minimal diklat JFP Muda yang diselenggarakan oleh Bappenas dan atau lembaga mitra yang setara;
- Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan STAN, STIS, IPDN/STPDN/IIP, STPN, STIA LAN dan STIE;
- Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
- Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan IPDN/STPDN/IIP.

c. Tidak Menerima Calon Karyasiswa D4

- Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;

- Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
- Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada;
- Magister Ekonomi, Universitas Andalas;
- Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
- Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
- Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin;

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

a) Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;

b) Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 122 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	NAD	Aceh Singkil	-
2	Sumatera Utara	Nias Barat	-
3	Sumatera Utara	Nias Utara	-
4	Sumatera Utara	Nias	-
5	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-
7	Sumatera Barat	Pasaman Barat	-
8	Sumatera Barat	Solok Selatan	-
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	-
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
11	Bengkulu	Seluma	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
12	Lampung	Lampung Barat	-
13	Lampung	Pesisir Barat	DOB
14	Jawa Timur	Bondowoso	-
15	Jawa Timur	Situbondo	-
16	Jawa Timur	Bangkalan	-
17	Jawa Timur	Sampang	-
18	Banten	Pandeglang	-
19	Banten	Lebak	-
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	-
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	-
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	-
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	-
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	-
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	-
26	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-
27	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	-
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	-
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	-
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	-
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	-
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	-
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
46	Kalimantan Barat	Sambas	-
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	-
48	Kalimantan Barat	Landak	-
49	Kalimantan Barat	Ketapang	-
50	Kalimantan Barat	Sintang	-
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
52	Kalimantan Barat	Melawi	-
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	-
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	-
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	-
56	Kalimantan Utara	Nunukan	-
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	DOB
58	Gorontalo	Boalemo	-
59	Gorontalo	Gorontalo Utara	-
60	Gorontalo	Pohuwato	-
61	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	-
62	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	-
63	Sulawesi Tengah	Donggala	-
64	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	-
65	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
66	Sulawesi Tengah	Sigi	-
67	Sulawesi Tengah	Buol	-
68	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	DOB
69	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	DOB
70	Sulawesi Selatan	Jeneponto	-
71	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
72	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	DOB
73	Sulawesi Tenggara	Konawe	-
74	Sulawesi Tenggara	Bombana	-
75	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	DOB
76	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	-
77	Maluku	Kab. Maluku Tengah	-
78	Maluku	Kab. Pulau Buru	-
79	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-
80	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	-
81	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	-
82	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	-
83	Maluku	Kab. Buru Selatan	-
84	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	-
85	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	-
86	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	-
87	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	-
88	Maluku Utara	Kab. Morotai	-
89	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	DOB
90	Papua	Keerom	-
91	Papua	Sarmi	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
92	Papua	Pegunungan Bintang	-
93	Papua	Memberamo Tengah	-
94	Papua	Biak Numfor	-
95	Papua	Supiori	-
96	Papua	Kepulauan Yapen	-
97	Papua	Waropen	-
98	Papua	Memberamo Raya	-
99	Papua	Merauke	-
100	Papua	Asmat	-
101	Papua	Mappi	-
102	Papua	Boven Digoel	-
103	Papua	Nabire	-
104	Papua	Intan Jaya	-
105	Papua	Deiyai	-
106	Papua	Dogiyai	-
107	Papua	Paniai	-
108	Papua	Jayawijaya	-
109	Papua	Lanny Jaya	-
110	Papua	Yalimo	-
111	Papua	Yahukimo	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
112	Papua	Tolikara	-
113	Papua	Puncak	-
114	Papua	Puncak Jaya	-
115	Papua	Nduga	-
116	Papua Barat	Sorong	-
117	Papua Barat	Sorong Selatan	-
118	Papua Barat	Maybrat	-
119	Papua Barat	Tambrauw	-
120	Papua Barat	Raja Ampat	-
121	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
122	Papua Barat	Teluk Wondama	-

*Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di atas.

2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Surat Penawaran Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	Agustus 2020
2	*Deadline* Registrasi *Online*	Oktober 2020
3	*Deadline* Cap Pos Pengiriman Berkas Peserta	Oktober 2020
4	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020
5	Seleksi Nasional TPA Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020
6	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TOEFL Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020
7	Seleksi Nasional TOEFL Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*	November 2020
8	Pemanggilan Peserta S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* Tahun 2021 Tahap 1	Desember 2020

*Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

2.4. Pilihan Program Studi

NO	PROGRAM STUDI
1	Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
2	Magister Ekonomi, Universitas Andalas;
3	Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;
5	Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
6	Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
7	Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
8	Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
9	Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
10	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
11	Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
12	Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
13	Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
14	Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
15	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;

NO	PROGRAM STUDI
16	Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
17	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;
18	Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
19	Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
20	Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;
21	Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada;
22	Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;
23	Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya;
24	Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
25	Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
26	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (Tematik *Smart City*)
27	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro (Tematik *Smart City*)
28	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (Tematik *Smart City*)

2.5. Prosedur Pelamaran

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara *online*** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui

pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasan langsung (**minimal pejabat eselon II BKD/Biro Kepegawaian/Biro SDM masing-masing daerah**). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama–nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program/topik beasiswa yang diminati;

3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pusbindiklatren telah mengunggah berkas Penawaran Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2021 program S2 Dalam Negeri dan S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* pada situs http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
5. **Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
7. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
    a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
    b) Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
    c) Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
    d) Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
    e) Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
    f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
    g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.
6. Peserta yang memenuhi syarat administrasi (MS), lulus TPA dan TOEFL akan diproses untuk seleksi penempatan selama 2 tahun (selama nilai TPA dan TOEFLnya masih berlaku), **dengan syarat** diusulkan kembali oleh pejabat pengelola kepegawaian (minimal Pejabat Eselon II), kecuali ada surat pembatalan pencalonan dari instansi asalnya (minimal Pejabat Eselon II).

2.6. Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (surat terlampir)

2.7. Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, **peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara**, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
    a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
    b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
    c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari.

Lampiran 3.1.

LAMPIRAN

Format Pernyataan Rencana Studi

Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;

Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari–hari;

Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari–hari;

Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

Lampiran 3.2.

Panduan Registrasi *Online*

Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar
2. Masukan NIP Anda lalu klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re–Password* lalu klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
5. Lalu klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert* klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu ***Lupa Password***: http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan klik *link Forgot Password;*
5. Jika terdapat peringatan/*Alert* klik OK;
6. Silakan klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan klik UNDUH;

DIPAKAI HANYA JIKA BERMASALAH DALAM ONLINE

Lampiran 3.3.

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)

---

1. **Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir)** : .....
2. **NIP** : .....
3. **Tempat, Tanggal Lahir** : .....
   Jenis Kelamin : L/P
4. **Alamat Rumah** : .....
   Kode Pos : .....
   Kota/Kabupaten : .....
   Provinsi : .....
   Telepon/Handphone : .....
5. **Email Address** : .....
6. **Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL)** : .....
7. **Unit Kerja Eselon II/III** : .....
8. **Alamat Kantor** : .....
   Kode Pos : .....
   Kota/Kabupaten : .....
   Provinsi : .....
   Telepon/Handphone : .....
   Email Instansi : .....
9. **Jabatan** : .....
   Golongan : .....
10. **Unit/Bagian Tempat Bekerja** : .....
    Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
    Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
11. **Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara** :

    .....

    .....

    .....

    .....

    TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 : .....
    Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A : .....

12. **Pendidikan Terakhir** : **DIV/S1/S2**

    Perguruan Tinggi : **.....**

    Fakultas (DIV/S1/S2) : **.....**

    Jurusan : **.....**

    Lulus Tahun (DIV/S1/S2) : **.....**

    IPK (Skala 4.0) : **..... dari .....**

13. **Selain beasiswa Pusbindiklatren, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya? Ya/Tidak**

14. **Pilihan Rencana Studi S2 :**

    Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia :

    (.....) Program S2 Dalam Negeri → DIURUTKAN SESUAI PRIORITAS PILIHAN

    1. .....

    2. .....

    3. .....

    4. .....

    5. .....

    (.....) Program S2 Dalam Negeri Tematik *Smart City* → DIURUTKAN SESUAI PRIORITAS PILIHAN

    1. .....

    2. .....

    3. .....

    (.....) Pelatihan Bahasa Inggris (BEAP) → JIKA BERMINAT MENGIKUTI PELATIHAN BAHASA INGGRIS

15. **Tuliskan rencana studi pada program S2/S3 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. Silakan menggunakan kertas tambahan jika diperlukan.**

    .....

    .....

    .....

    .....

    .....

BISA MENGGUNAKAN KERTAS TERPISAH

.....

.....

.....

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

....., ... 2020

Menyetujui,	**Yang Bersangkutan,**
(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)	
(TTD dan Cap Basah)	**(Materai 6000 Rupiah)**
(.....)	**(.....)**

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterei asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Lampiran 3.4.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM

PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ……
NIP	: ……
Jabatan	: ……
Unit Kerja	: ……
Instansi	: ……

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama	: ……
NIP	: ……
Jabatan	: ……
Unit Kerja	: ……
Instansi	: ……

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

TIDAK DIWAJIBKAN MELENGKAPI KELIMA PILIHAN DAN PASTIKAN PILIHAN SESUAI DENGAN ISI FORMULIR REGISTRASI

Pilihan-pilihan program tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi calon peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2020

Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 6000, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.